

# **SKRIPSI**



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENGRUSAKAN BARANG  
(Studi Putusan Nomor 1309/Pid.B/2012/PN.Mks)**

**OLEH:**

**SAFWAN BAHAR**

**B111 09 404**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2014**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENGRUSAKAN BARANG  
(Studi Putusan Nomor 1309/Pid.B/2012/PN.Mks)**

**OLEH :**

**SAFWAN BAHAR**

**B 111 09 404**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Penyelesaian Studi Sarjana  
Hukum Dalam Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2014**

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA**  
**PENGRUSAKAN BARANG**

(Studi Putusan Nomor 1309/Pid.B/2012/PN.Mks)

Disusun dan diajukan oleh

**SAFWAN BAHAR**

**B 111 09 404**

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada hari Kamis, 12 Juni 2014  
Dan Dinyatakan Diterima

**Panitia Ujian**

**Ketua**



**Prof. Dr. Muhadar, S.H. M.S.**  
NIP. 195903171987031002

**Sekretaris**



**Hj. Nur Azisa, S.H. M.H.**  
NIP. 196710101992022002

**An. Dekan**  
**Wakil Dekan Bidang Akademik,**



**Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.**  
NIP. 19630419 198903 1 003

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Mahasiswa :

Nama : Safwan Bahar

Nomor Pokok : B111 09 404

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana  
Pengrusakan Barang (Studi Putusan Nomor  
1309/Pid.B/2012/PN.Mks).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam seminar ujian skripsi.

Makassar, 07 Maret 2014


Pembimbing I



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.

NIP. 195903171987031002

Pembimbing II



Hj. Nur Azisa, S.H., M.H.

NIP. 196710101992022002

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Skripsi Mahasiswa :

Nama : Safwan Bahar

Nomor Pokok : B111 09 404

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana  
Pengrusakan Barang (Studi Putusan Nomor  
1309/Pid.B/2012/PN.Mks).

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai tugas akhir  
Program Studi

Makassar, 07 Maret 2014

a.n. Dekan

Wakil Dekan I,



**Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.**  
**NIP. 19630419 198903 1 003**

## **ABSTRAK**

**SAFWAN BAHAR (B11109404),” Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengrusakan Barang (Studi Putusan Nomor 1309/Pid.B/2012/PN.Mks), (Dibimbing oleh Muhadar Selaku Pembimbing I dan Nur Azisa Selaku Pembimbing II)”.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan barang dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan barang.

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar dengan memilih instansi yang terkait dengan perkara ini, yakni penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Metode Kepustakaan dan Metode Wawancara, kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penerapan hukum pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam Putusan Nomor 1309/Pid.B/2012/PN.Mks yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tenaga bersama di muka umum melakukan kekerasan terhadap barang yang mengakibatkan rusak yang diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sudah tepat, hal itu sesuai dan telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa. 2) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara dengan Putusan Nomor 1309/Pid.B/2012/PN. Mks ini, pertimbangannya sudah obyektif, telah berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan. Dan hakim pun telah melaksanakan amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

## UCAPAN TERIMA KASIH



Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Puji syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Agung dan Maha Kuasa dan atas segala kuasanya dan atas segala limpahan Rahmat, Taufik, serta Hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGUSAKAN BARANG (Studi Putusan Nomor 1309/Pid.B/2012/PN.Mks)”**. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad S.A.W yang selalu memberikan cahaya dan menjadi suri tauladan bagi seluruh umatnya di muka bumi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan Penulis dalam mengeksplorasi lautan ilmu pengetahuan yang begitu cemerlang menuju proses pencerahan. Olehnya itu Penulis selalu menyediakan ruang untuk saran dan kritikan dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Selama penyusunan skripsi ini, tidak terlepas dari berbagai rintangan, namun berkat dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik moril maupun meteril akhirnya Penulis dapat mengatasi dan melaluinya. Oleh karena itu melalui kesempatan ini, Penulis mengucapkan

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua Penulis ayahanda Bahar Rauf, S.E. dan ibunda Hj. Nuraeni Abu yang telah mencurahkan banyak cinta dan kasih sayang, doa dan air mata, pengorbanan tiada henti yang hingga sampai kapanpun Penulis tidak dapat membalasnya. Kepada istri Penulis Nuryasmin Indhar Pratiwi dan anak tercinta Muh. Aditya Rafsya yang turut serta memberikan dukungan dan doa serta keceriaan. Kepada keluarga besar kakanda Arni Reskiawaty, S.Pd., Brigpol. Saiful Bahar yang telah memberikan segala kemudahan dan dukungan materil sejak Penulis mulai dari pertama kuliah sampai pada Penulis menyelesaikan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dengan segala kerendahan hati, Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idrus Paturusi Sp.OB. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Bapak Romi Librayanto. S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.



6. Bapak Prof. Dr. Muhadar. S.H., M.S. sebagai ketua bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S. sebagai pembimbing I dan Ibu Hj. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. sebagai pembimbing II yang selalu mengarahkan dalam penulisan skripsi ini hingga selesai.
8. Bapak Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H., Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. selaku penguji yang senantiasa memberikan saran dan masukan dalam penyusunan skripsi Penulis.
9. Bapak-bapak/ibu-ibu staf pengajar (dosen) dan pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan dan pengarahan dan bantuan selama proses perkuliahan.
10. Kepada Keluarga besar yang memberikan dukungan serta semangat kepada Penulis, kepada istri tercinta Nuryasmin Indhar Pratiwi dan anakda tersayang Muh. Aditya Rafsya. Kepada kakanda Arni Reskiawaty, S.Pd. dan Brigpol. Saiful Bahar atas dukungan moril dan materil yang begitu besar kepada Penulis.
11. Kepada mertua Muh. Nurman, B.E. dan Qamriyani Zain, S.E. yang sebagai orang tua kedua dan ipar-ipar yang sebagai saudara kedua penulis, yang memberikan dukungan moril serta doa.
12. Kepada Kepala Pengadilan Negeri Makassar beserta staf yang telah bersedia memberikan informasi kepada Penulis.

13. Kepada teman-teman senasib seperjuangan Saudara Sandi Putra, S.H., Saudara Adi Suriadi, S.E., Saudara Ade Chandra, Saudara Unirsal, S.H., Saudara Mury Alfandi S.H., Saudara Abd. Aziz Dumpa, Saudara Rudi Hartono, Saudara Muhammad Taufiq, Saudara Alex (Uyu), Saudara Wahyu Rasyid, S.H., Bapak Jack (Oher Parkiran Fakultas), Saudara Rahadian Gusti Pratama, Saudari Rika Elvira, Saudara Indra Pradana Mulyawan, S.H., Adinda Setya, Adinda Adi Suriadi, beserta teman-teman angkatan “Doktrin 2009” atas dukungan, suka duka, bantuan dan semangat yang begitu besar yang diberikan kepada Penulis.
14. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan KKN Gel. 83 Pulau Sebatik, Nunukan Kalimantan Timur, khususnya Posko Desa Sungai Manurung Kecamatan Sebatik Induk, terima kasih atas dukungan, suka duka, semangat, dan bantuannya selama ini dalam melaksanakan program kerja selama ber\_KKN.
15. Kepada Ibu Monica dan keluarga yang dengan kemurahan hatinya tanpa ada keluhan sedikit pun menerima kami di rumah beliau disaat ber\_KKN, semoga kebbaikannya senantiasa menjadi nilai pahala disisi\_Nya serta mendapat limpahan rahmat\_Nya.
16. Kepada Kepala Desa Sungai Manurung yang telah memberikan fasilitas dan kemudahan dalam melancarkan program kerja kami selama ber\_KKN.

17. Kepada teman-teman di rumah dan para tetangga, terima kasih atas semangat dan hiburannya selama ini.

18. Kepada teman-teman Remaja Masjid Jami Al-Ittihad, atas dukungan dan doa serta semangat yang diberikan.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi Penulis dan para pembaca pada umumnya, semoga Allah SWT meridhoi dan senantiasa bernilai ibadah disisi\_Nya, Amin.

Makassar, 07 Maret 2014

Penulis

**SAFWAN BAHAR**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	iv
ABSTRAK .....	v
UCAPAN TERIMA KASIH .....	vi
DAFTAR ISI .....	xi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kegunaan Penelitian .....	5

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana	
1. Pengertian Tindak Pidana .....	6
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	7
B. Tindak Pidana Pengrusakan	
1. Pengertian Tindak Pidana Pengrusakan .....	12
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pengrusakan .....	13
C. Pengertian Barang .....	16
D. Pidana dan Pemidanaan	
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan .....	16
2. Teori dan Tujuan Pemidanaan .....	18
3. Jenis-Jenis Pidana .....	19
E. Pertimbangan Hakim	
1. Pertimbangan Yuridis .....	23
2. Pertimbangan Sosiologis .....	28

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian .....	29
B. Jenis dan Sumber Data .....	29
C. Teknik Pengumpulan Data .....	30
D. Analisis Data .....	31

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pengrusakan Barang	
Dalam Putusan Nomor 1309/Pid.B/2012/PN.Mks .....	32
1. Posisi Kasus .....	32
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) .....	38
3. Tuntutan Penuntut Umum .....	45
4. Amar Putusan .....	46
5. Analisis Penulis .....	47
 B. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengrusakan Barang	
Dalam Putusan Nomor 1309/Pid.B/2012/PN.Mks .....	53
1. Pertimbangan Yuridis .....	54
2. Pertimbangan Sosiologis .....	64
3. Analisis Penulis .....	66

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
-----------------------------	-----------

## **LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, yang mengandung makna bahwa segala tindakan serta pola tingkah laku setiap warga negaranya harus sesuai dengan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh negara. Apabila berbicara masalah hukum, maka akan dihadapkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pergaulan hidup manusia di masyarakat yang diwujudkan sebagai proses interaksi dan interrelasi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya didalam kehidupan bermasyarakat.

Negara hukum merupakan terjemahan dari konsep *rechtstaat* atau *rule of law* yang bersumber dari pengalaman demokrasi konstitusional di Eropa pada abad ke-19 dan abad ke-20. Oleh karena itu, ciri-ciri negara hukum antara lain: adanya supremasi hukum, jaminan hak asasi manusia, dan legalitas hukum. Di negara hukum, peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada undang-undang dasar (konstitusi) merupakan satu kesatuan sistem hukum sebagai landasan bagi setiap penyelenggara kekuasaan.

Konsep "*Demokrasi*" berasal dari bahasa Yunani yaitu "*Demos*" yang berarti rakyat dan "*Cratos*" atau "*Cretein*" yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi "*Demos-Cratos*" atau "*Demos- Cretein*" berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat (A. Rasyid Rahman, 2006:

42). Oleh sebab itu, rakyat mempunyai pengaruh dan peranan yang sangat penting dalam suatu pemerintahan. Dalam suatu negara demokrasi dikenal bahwa kekuasaan tertinggi berada pada rakyat, yang merupakan komponen utama dari suatu pemerintahan negara. Sejak bergulirnya reformasi pada tahun 1998, gerakan demonstrasi atau unjuk rasa di Indonesia semakin meluas. Hampir di setiap daerah, orang melakukan unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasinya. Aksi unjuk rasa atau demonstrasi merupakan salah satu hak setiap warga negara yang dilindungi oleh negara dalam konstitusi dasar dan undang-undang. Kemerdekaan menyampaikan pendapat ini merupakan sarana bagi setiap warga negara untuk menggapai tujuannya.

Demonstrasi atau unjuk rasa adalah pernyataan protes yang dikemukakan secara massal (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002: 250). Istilah unjuk rasa kini telah dikenal oleh semua kalangan masyarakat, baik tua maupun muda, bahkan sesekali terlihat baik secara langsung maupun di media massa, anak-anak juga dilibatkan dalam kegiatan ini. Seringkali disaksikan bahwa unjuk rasa biasanya dilakukan oleh para mahasiswa yang tidak sependapat terhadap kebijakan yang diterima. Generasi muda harapan bangsa ini biasanya melakukan unjuk rasa terhadap pemerintah atau pihak rektorat kampus. Namun seringkali unjuk rasa ini berakhir dengan keributan, pengrusakan fasilitas umum, sampai dengan jatuhnya korban jiwa yang seringkali jumlahnya tidak sedikit. Unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa bukan hanya untuk

kepentingan rakyat semata, tetapi juga untuk kepentingan mahasiswa sendiri atau sekelompok mahasiswa saja. Mahasiswa melakukan unjuk rasa di dalam area kampus karena ada kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak kampus yang merugikan mahasiswa dan tidak mementingkan kepentingan mahasiswa.

Dalam praktik unjuk rasa, kebebasan atau kemerdekaan untuk menyampaikan aspirasi tidak selamanya berjalan sesuai yang diharapkan oleh mahasiswa yang melakukan demonstrasi. Oleh karena itu banyak aksi unjuk rasa yang berakhir dengan kerusakan yang mengarah pada tindakan pengrusakan. Tindakan pengrusakan yang terjadi dilakukan oleh para mahasiswa itu sendiri merupakan tindak pidana. Unjuk rasa yang bersifat pengrusakan dapat mengganggu ketertiban dan keamanan kampus. Unjuk rasa yang berakhir pengrusakan sering kali juga menelan korban jiwa dan luka-luka baik dari pihak pengunjuk rasa maupun dari pihak pengamanan aksi unjuk rasa yaitu satuan keamanan (satpam) kampus bahkan polisi.

Realitas menunjukkan bahwa masih seringnya terjadi unjuk rasa atau demonstrasi yang berujung pada pengrusakan fasilitas-fasilitas kampus, dimana hal tersebut sangat mengganggu kenyamanan dan ketertiban dalam melakukan aktivitas kampus. Bertolak dari realitas tersebut timbul beberapa pertanyaan bahwa apakah pelaku-pelaku demonstrasi anarkis ini tidak mendapat sanksi yang membuat mereka jahat atau bahkan mereka tidak mendapatkan sanksi sama sekali,



sehingga masih sering terjadi demonstrasi yang anarkis dan berujung pengrusakan.

Berdasarkan permasalahan dan realitas yang disebutkan di atas, maka Penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengrusakan Barang (Studi Putusan Nomor 1309/Pid.B/2012/PN.Mks)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap Tindak Pidana Pengrusakan Barang dalam putusan Nomor 1309/ Pid.B/2012/PN.Mks?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Pengrusakan Barang dalam putusan Nomor 1309/ Pid.B/2012/PN.Mks?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pengrusakan barang dalam Putusan Nomor 1309/ Pid.B/2012/PN.Mks.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan barang dalam Putusan Nomor 1309/ Pid.B/2012/PN.Mks.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat menambah masukan dalam menunjang pengembangan ilmu bagi Penulis sendiri pada khususnya dan mahasiswa fakultas hukum pada umumnya.
2. Diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan referensi bagi semua pihak, khususnya bagi pihak yang berkompeten dalam mengemban tugas profesi hukum.
3. Diharapkan dapat memberikan masukan pada semua pihak dalam rangka penanggulangan tindak pidana pengrusakan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tindak Pidana**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, dikenal dengan istilah "*strafbaar feit*". Istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah yaitu tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan perbuatan pidana.

Kanter dan Sianturi (Erdianto Effendi, 2011: 99), memberikan pengertian tindak pidana sebagai berikut:

Tindak pidana ialah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (mampu bertanggung jawab).

Moeljatno (2009: 59) mendefenisikan perbuatan pidana sebagai berikut:

perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam saat itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana itu ditujukan kepada orang yang ditimbulkan kejadian itu.

Dari kedua pendapat di atas, maka dapat diartikan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang mana

perbuatan tersebut melanggar apa yang dilarang atau apa yang diperintahkan oleh suatu aturan hukum atau undang-undang dan disertai dengan sanksi berupa sanksi pidana.

Tindak pidana juga dijadikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidana itu sendiri, yaitu harus berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*), asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang (Amir Ilyas, 2012: 27).

Asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dirumuskan di dalam bahasa latin : *“Nulum delictum nulla poena sine praevia lege poenali”*, yang dapat dirumuskan dalam bahasa Indonesia kata demi kata: “Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya”.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Kata *strafbaar* artinya ‘dapat dihukum’. Arti harfiahnya ini tidak dapat diterapkan dalam bahasa sehari-hari karena yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi bukan menghukum kenyataan, perbuatan, maupun tindakan. Oleh sebab itu, tindak pidana adalah

tindakan manusia yang dapat menyebabkan manusia yang bersangkutan dapat dikenai hukum atau dihukum.

Unsur tindak pidana dapat dibeda-bedakan setidaknya dari dua sudut pandang menurut Adami Chazawi (2002: 79), yaitu:

- 1) Dari sudut pandang teoritis.  
Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya.
- 2) Dari sudut undang-undang.  
Sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Menurut Satochid Kartanegara (Leden Marpaung, 2005: 10), menjelaskan bahwa:

Unsur delik terdiri dari atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur yang objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia yaitu, suatu tindakan, suatu akibat, dan keadaan (*omstandigheid*). Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan berupa kemampuan dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaarheid*), dan kesalahan.

Seorang ahli hukum yaitu Simon (Andi Hamzah, 2004: 88), merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Diancam pidana oleh hukum;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dan
- d. Orang itu dipandang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya.

Menurut Moeljatno (Adami Chazawi, 2002: 79), unsur tindak pidana adalah:

- a) Perbuatan;
- b) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c) Ancaman pidana (yang melanggar larangan).

Dari rumusan R. Tresna (Adami Chazawi, 2002: 80), tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni :

- a) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c) Diadakan tindakan penghukuman.

Dari batasan yang dibuat Jonkers (penganut paham monisme) (Adami Chazawi, 2002: 81) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a) Perbuatan (yang);
- b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang);
- d) Dipertanggungjawabkan.

Sementara itu Schravendijk (Adami Chazawi, 2002: 81) dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Kelakuan (orang yang);
- b) Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c) Diancam dengan hukuman;
- d) Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e) Dipersalahkan/kesalahan.

Walaupun rincian dari rumusan di atas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, baik itu dalam Buku II maupun Buku III dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana menurut Adami Chazawi (2002: 82) yaitu:

- a) Unsur tingkah laku;

- b) Unsur melawan hukum;
- c) Unsur kesalahan;
- d) Unsur akibat konstitutif;
- e) Unsur keadaan yang menyertai;
- f) Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana;
- g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h) Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana;
- i) Unsur objek hukum tindak pidana;
- j) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana; dan
- k) Unsur syarat tambahan unsur memperingan pidana.

Oleh sebab itu unsur-unsur tindak pidana menurut beliau terdiri dari:

- a) Merupakan perbuatan manusia;
- b) Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil); dan
- c) Perbuatan manusia tersebut melawan hukum yang berlaku (syarat materiil).

Syarat formil diperlukan untuk memenuhi asas legalitas dari hukum itu sendiri. Maksudnya adalah perbuatan dapat dikategorikan tindak pidana bila telah diatur dalam aturan hukum. Tindakan-tindakan manusia yang tidak atau belum diatur dalam aturan hukum tidak dapat dikenai sanksi dari aturan hukum yang bersangkutan. Biasanya akan dibentuk aturan hukum yang baru untuk mengatur tindakan-tindakan tersebut.

Bila dirinci, maka secara umum unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan objektif.

#### a. Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman tanpa ada kesalahan” (*An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud di

sini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*). Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yaitu:

- a) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
- b) Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*); dan
- c) Kesengajaan dengan keinsyafan akan kemungkinan (*dolus evantualis*).

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yaitu:

- 1) Tak berhati-hati, dan
- 2) Dapat menduga akibat itu.

b. Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri si pelaku yaitu sebagai berikut:

- 1) Perbuatan manusia, berupa:
  - a) *Act*, yaitu perbuatan aktif, dan
  - b) *Omission*, yaitu perbuatan pasif (perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan).
- 2) Akibat (*result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum. Misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.



- 3) Keadaan-keadaan (*circumstances*)
  - a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan, dan
  - b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan.
- 4) Sifat dapat dihukum dan melawan hukum

Semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, dapat menyebabkan terdakwa dibebaskan oleh Hakim di pengadilan.

## **B. Tindak Pidana Pengrusakan**

### **1. Pengertian Pengrusakan**

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 971), kata “Pengrusakan” tidak dapat diartikan sendiri. Namun kata ‘*rusak*’ berarti sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi, bisa juga berarti hancur dan binasa. Jadi pengrusakan bisa berarti proses, cara, dan perbuatan merusakkan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang sehingga menjadi tidak sempurna (baik, utuh) lagi.

Menurut R. Soesilo (1995: 278), pengrusakan dalam KUHP adalah tergolong dalam kejahatan. Pengrusakan terdapat dalam Buku II KUHP, dapat dilihat dalam BAB V Tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum yaitu pada Pasal 170 dan Bab XXVII Tentang Menghancurkan atau Merusakkan Barang yang dimulai dari Pasal 406 sampai Pasal 412 KUHP.

Pengrusakan dalam Pasal 170 KUHP yaitu sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

Pengrusakan dalam pasal 406 KUHP yaitu sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-
- (2) Hukuman serupa itu dikenakan juga kepada orang yang dengan sengaja dan dengan melawan hukum membunuh, merusakkan membuat sehingga tidak dapat digunakan lagi atau menghilangkan binatang, yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain.

## **2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pengrusakan**

R. Soesilo (1995 :279) memberikan penafsiran mengenai pengrusakan dan memberikan batasan-batasan yang termasuk kategori tindak pidana pengrusakan agar supaya tindak pidana pengrusakan dapat dihukum. R. Soesilo (1995: 279) menguraikan unsur-unsur pengrusakan sebagai berikut:

- a. Bahwa terdakwa telah membinasakan, merusakkan membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang.
- b. Bahwa pembinasakan dan sebagainya itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hukum.
- c. Bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.

Kemudian R. Soesilo (1995: 279) menjelaskan lebih lanjut makna

Pasal 406 KUHP yakni:

Kata “Membinasakan” = menghancurkan atau merusak sama sekali, misalnya membanting gelas, cangkir, tempat bunga

sehingga hancur, sedang kata “Merusakkan” = kurang dari pada membinasakan, misalnya memukul gelas, cangkir dsb. Tidak sampai hancur, akan tetapi hanya pecah sedikit retak atau hanya putus pegangannya. “Membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi” = disini harus demikian rupa, sehingga barang itu tidak dapat diperbaiki lagi. Kata “Menghilangkan” = membuat sehingga barang itu tidak ada lagi. Dan yang dimaksud dengan “barang” = barang yang terangkat maupun barang yang tidak terangkat.

Selanjutnya Pasal 410 KUHP menentukan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan atau membikin tak dapat dipakai suatu gedung atau kapal yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Bagian inti atau unsur delik ini adalah:

- a. Sengaja;
- b. Dengan melawan hukum;
- c. Menghancurkan atau membikin tidak dapat dipakai; dan
- d. Suatu gedung atau kapal yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Ancaman pidananya lebih berat daripada Pasal 406 dan merupakan ketentuan khusus dari Pasal 406 ayat (1) KUHP. Jika pasal-pasal sebelumnya hanya ada kata-kata “merusak”, di sini hanya “menghancurkan” dan “membikin tak dapat dipakai”.

Kemudian pengrusakan juga dapat dilihat pada Pasal 170 KUHP menentukan bahwa:

Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.

R. Soesilo (1995: 146-147) memberikan penafsiran Pasal 170

KUHP bahwa yang dilarang pasal ini ialah “*Melakukan kekerasan*”. Kekerasan ini harus dilakukan bersama-sama, artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan pasal ini. Kemudian kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang dan kekerasan itu harus dilakukan di muka umum, karena kejahatan itu memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum.

Andi Hamzah (2011: 5-8) memberikan penafsiran Pasal 170 KUHP bahwa bagian inti atau unsur delik ini adalah:

1. Melakukan kekerasan;
2. Di muka umum atau terang-terangan (*openlijk*);
3. Bersama-sama; dan
4. Ditujukan kepada orang atau barang.

Beliau juga menambahkan bahwa:

- a. Yang dilarang ialah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan, yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang walaupun dia tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang. Misalnya perbuatan melempar batu kepada kerumunan orang atau kepada suatu barang, mengobrak-abrik barang sehingga dagangan berantakan, membalikkan kendaraan. Jadi, biasanya kelompok massa atau massa yang marah dan beringas, tanpa pikir akibat perbuatannya, mereka melakukan tindakan kekerasan, sehingga terjadi kerusuhan, kebakaran, orang lain luka bahkan mati.
- b. Kekerasan yang dilakukan di muka umum (disebutkan juga kejahatan terhadap ketertiban umum), yaitu di tempat orang banyak (publik) dapat melihat perbuatan kekerasan tersebut.
- c. Kekerasan yang dilakukan bersama orang lain atau kekerasan yang sedikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih.

- d. Kekerasaan yang dilakukan tersebut ditunjukkan kepada orang atau barang atau hewan, binatang, baik itu kepunyaan sendiri maupun kepunyaan orang lain.

### **C. Pengertian Barang**

Yang dimaksud dengan barang adalah semua benda yang berwujud seperti: uang, baju, perhiasan dan sebagainya termasuk pula binatan, dan benda yang tak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa. Selain benda-benda yang bernilai uang pencurian pada benda-benda yang tidak bernilai uang, asal bertentangan dengan pemiliknya (melawan hukum), dapat pula dikenakan pasal ini. Misalnya seorang jejaka mencuri dua tiga helai rambut dari gadis cantik tanpa izin gadis itu, dengan maksud untuk dijadikan kenang-kenangan, dapat pula dikatakan mencuri walaupun yang dicuri itu tak bernilai uang, (R. Sugandhi (1980: 376).

### **D. Pidana dan Pemidanaan**

#### **1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan**

Sarjana hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dan pidana yang dalam bahasa Belanda hanya dikenal dengan satu istilah umum untuk keduanya, yaitu *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana.

Menurut Van Hamel (P.A.F Lamintang, 2009: 47), mengatakan bahwa:

Arti dari pidana itu adalah *straf* menurut hukum positif dewasa ini, adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan yang harus ditegakkan oleh negara.

Muladi dan Barda Nawawi Arief (Amir Ilyas, Yuyun Widaningsih, 2010: 12), menyimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang), dan
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Adapun pengertian pemidanaan adalah tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.

Pemidanaan adalah tindakan yang diambil oleh Hakim untuk memidana seorang terdakwa melalui putusannya. Mengenai pengertian pemidanaan, Sudarto (M. Taufik Makarao, 2005: 16), mengemukakan sebagai berikut:

Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berchten*) menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga perdata.

Istilah penghukuman dapat disempitkan artinya, yaitu kerap kali disinonimkan dengan pembedaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh Hakim.

## **2. Teori dan Tujuan Pembedaan**

Ada tiga teori pembedaan yang dikenal dalam hukum pidana menurut Antonius Sudirman (2009: 107-112), yaitu sebagai berikut:

- a. Teori absolut atau teori pembalasan;
- b. Teori relatif atau teori tujuan, dan
- c. Teori gabungan (*Verenigings-Theorien*).

Teori-teori tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Teori absolut

Dikatakan dalam teori ini, setiap kejahatan haruslah diikuti dengan pidana. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Penganut teori pembalasan ini antara lain Kant dan Hegel. Mereka menganggap bahwa hukuman itu adalah suatu akibat dilakukannya suatu kejahatan. Sebab melakukan kejahatan, maka akibatnya harus dihukum. Hukuman itu bersifat mutlak bagi yang melakukan kejahatan.

Sthal (Adami Chazawi, 2002: 155), mengemukakan bahwa:

Hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui pemerintahan negara sebagai abdi atau wakil Tuhan di dunia, karena itu negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarnya.

b. Teori relatif atau teori tujuan

Berdasarkan teori ini, suatu kejahatan yang dilakukan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu hukuman, penganjur teori ini antara lain Paul Anselm van Feurbach. Pengertian dalam teori tujuan ini berbeda sekali dengan teori absolut. Kalau dalam teori absolut, tindakan pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka teori relatif ditujukan kepada hari-hari yang akan datang, yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat agar menjadi baik kembali.

c. Teori gabungan (*Verenigings-Theorien*)

Teori ini dipelopori oleh Hugo De Groot (Ilhami Basri, 2003: 12), beranjak dari pemikiran bahwasanya pidana merupakan suatu cara untuk memperoleh keadilan absolut, dimana selain bermuatan pembalasan bagi si pelaku kejahatan, sekaligus mencegah masyarakat lain sebagai pelaku kejahatan.

Teori gabungan ini adalah teori kombinasi dari teori absolut dan relatif. Teori ini mensyaratkan bahwa pembedaan itu selain memberikan penderitaan jasmani dan psikologis, yang terpenting adalah memberikan pembinaan dan pendidikan.

### **3. Jenis-Jenis Pidana**

Pasal 10 KUHP, jenis-jenis pidana digolongkan menjadi dua, yaitu:

1. Pidana pokok, dan
2. Pidana tambahan.



## 1. Pidana pokok

Jenis-jenis pidana pokok yang dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP, adalah:

### 1) Pidana mati

Hukuman pidana mati yang berlaku di Indonesia diatur dalam Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan militer.

Penetapan tata cara pelaksanaan pidana mati ditetapkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 27 April 1946 dengan pertimbangan bahwa pelaksanaan hukuman mati yang ada sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa bangsa Indonesia, dimana pada saat sebelum adanya PP No. 2 Thn. 1946 yang berlaku adalah hukuman gantung.

Dalam Pasal 1 PP No. 2 Thn. 1964 ini, secara tegas menyatakan bahwa pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan, baik di lingkungan peradilan umum maupun peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati.

### 2) Pidana penjara

P.A.F. Lamintang (Amir Ilyas, 2012: 110), menyatakan bahwa:

Bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah lembaga pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga

pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.

Dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka secara otomatis ada beberapa hak-hak kewarganegaraan yang juga ikut terbatas, seperti hak untuk dipilih dan memilih (dalam kaitannya dengan pemilihan umum), hak memegang jabatan publik dan lain-lain.

### 3) Pidana kurungan

Hal-hal yang diancamkan dengan pidana kurungan adalah delik yang dipandang ringan seperti delik *culpa* dan pelanggaran. Menurut Niniek Suparni (2007: 23), bahwa pidana kurungan adalah sebagai berikut:

Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang.

### 4) Pidana denda

Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda oleh Hakim/pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Pidana denda ini dapat ditanggung oleh orang lain selama pelaku delik terpidana. Oleh karena itu, walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang lain atas nama terpidana.

Apabila terpidana tidak membayar uang denda yang telah diputuskan, maka konsekuensinya adalah harus menjalani kurungan (jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan, Pasal 30 ayat (2) KUHP) sebagai pengganti dari pidana denda.

## 2. Pidana tambahan

Yang termasuk kedalam jenis pidana tambahan yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan Hakim.

### 1) Pencabutan hak-hak tertentu

Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh Hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah:

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
2. Hak memasuki Angkatan Bersenjata;
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
4. Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
6. Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.

### 2) Perampasan barang tertentu

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya pidana denda. Jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan Hakim, yaitu berupa barang-barang milik terdakwa, yaitu barang yang

diperoleh dari hasil kejahatan dan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan.

Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat dalam Pasal 39 KUHP yaitu:

- (1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
- (2) Dalam hal pembedaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang.
- (3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

### 3) Pengumuman putusan Hakim

Pengumuman putusan Hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP, yang mengatur bahwa:

Apabila Hakim memerintahkan agar putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lainnya, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana.

## **E. Pertimbangan Hakim**

### **1. Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang memandang hukum sebagai suatu sistem yang utuh yang mencakupi asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan aturan-aturan hukum. Di dalam pertimbangan yuridis inilah hakim menilai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dipersidangan.

Peringanan dan pemberatan pidana sebenarnya terkait dengan prinsip pertanggungjawaban pidana. Dasar pengurangan pidana diatur dalam beberapa pasal dalam KUHP.

a. Karena usia belum dewasa

Tentang hal-hal yang meringankan pidana karena usia belum dewasa diatur dalam Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 KUHP. Akan tetapi sejak berlakunya Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak maka ketiga pasal tersebut tidak berlaku lagi.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, dasar peringanan pidana umum adalah sebab pembuatnya anak (disebut anak nakal) yang umurnya telah 8 (delapan) tahun tetapi belum 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan anak yang belum berusia 8 (delapan) tahun dan melakukan tindak pidana tidak dapat diajukan ke pengadilan tetapi dapat dilakukan penyidikan.

b. Percobaan dan pembantuan melakukan kejahatan

Unsur meringankan pada percobaan melakukan kejahatan diatur dalam Pasal 53 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga. Sedangkan perihal pembantuan diatur dalam Pasal 57 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga. Percobaan dan

pembantuan adalah suatu ketentuan/aturan umum (yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang) mengenai penjatuhan pidana terhadap pembuat yang gagal dan orang yang membantu orang lain melakukan kejahatan, yang artinya orang yang mencoba itu atau orang yang membantu (pelaku pembantu) tidak mewujudkan suatu tindak pidana tertentu, hanya mengambil sebagian syarat suatu tindak pidana tertentu.

Sedangkan pemberatan pidana dapat dilakukan karena beberapa hal yang juga termaktub dalam KUHP, yaitu sebagai berikut:

a. Dasar pemberatan pidana karena jabatan

Pemberatan karena jabatan diatur dalam Pasal 52 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

Bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya ditambah sepertiga.

b. Dasar pemberatan pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan

Pemberatan dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan ini diatur dalam Pasal 52a KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

Bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut dapat ditambah sepertiga.

c. Pengulangan tindak pidana

Mengenai pengulangan ini, KUHP mengatur sebagai berikut: *Pertama*, menyebutkan dengan mengelompokkan tindak-tindak pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang dapat terjadi pengulangan. Pengulangan hanya terbatas pada tindak-tindak pidana tertentu yang disebutkan dalam Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 KUHP. *Kedua*, di luar kelompok kejahatan dalam Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 KUHP juga menentukan beberapa tindak pidana khusus tertentu yang dapat terjadi pengulangan, misalnya Pasal 216 ayat (3), Pasal 489 ayat (2), Pasal 495 ayat (2), dan Pasal 501 ayat (2) KUHP.

d. Karena perbarengan (*concursum*)

Ada 3 (tiga) bentuk perbarengan yang dikenal dalam hukum pidana, yaitu *concursum idealis*, *concursum realis*, dan *Delictum Continuum/Voortgezettehandeling*. Ketiga bentuk *concursum* itu adalah sebagai berikut:

- *Concursum idealis* (perbarengan peraturan)

*Concursum idealis* yaitu suatu perbuatan yang masuk kedalam lebih dari satu aturan pidana. Disebut juga sebagai gabungan berupa satu perbuatan, yakni suatu perbuatan meliputi lebih dari satu pasal ketentuan hukum pidana. Sistem pemberian pidana yang dipakai dalam *concursum idealis* adalah sistem *absorpsi*, yaitu hanya dikenakan pidana pokok yang terberat. Dalam KUHP Bab II Pasal 63 tentang perbarengan disebutkan:

- (1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu, jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
- (2) Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan.

- *Concursus realis* (perbarengan perbuatan)

*Concursus realis* atau gabungan beberapa perbuatan terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana. *Concursus realis* ini diatur dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 71 KUHP.

- *Delictum Continuatum /Voortgezettehandeling* (perbuatan berlanjut)

Perbuatan berlanjut ini diatur dalam Pasal 64 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) KUHP. Perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran), dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Dalam MvT (*Memorie van Toelichting*), kriteria “perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” adalah:

- (a) Harus ada satu niat, kehendak atau keputusan;
- (b) Perbuatan-perbuatannya harus sama atau sama macamnya;  
dan
- (c) Tenggang waktu diantara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama.



Sistem pemberian pidana bagi perbuatan berlanjut menggunakan sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana terberat, dan bilamana berbeda-beda maka dikenakan ketentuan yang memuat pidana pokok yang terberat.

## **2. Pertimbangan Sosiologis**

Pertimbangan sosiologis adalah pertimbangan yang menggunakan pendekatan-pendekatan terhadap latar belakang, kondisi sosial ekonomi dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Pasal 5 ayat (1) Rancangan KUHP Nasional Tahun 1999-2000, menentukan bahwa dalam pembedaan, hakim mempertimbangkan:

1. Kesalahan terdakwa;
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
3. Cara melakukan tindak pidana;
4. Sikap batin membuat tindak pidana;
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku;
6. Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana;
7. Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku;
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, terhadap korban atau keluarga.

### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Lokasi Penelitian**

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka Penulis melakukan penelitian di Kota Makassar. Pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan ditempat yang dianggap mempunyai data yang sesuai dengan objek yang diteliti, yaitu di Pengadilan Negeri Makassar.

### **B. Jenis dan Sumber Data**

Sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian ini, maka jenis dan sumber data yang diperlukan adalah:

#### **1. Jenis Data**

##### **a. Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan melakukan wawancara terhadap responden yang dianggap mengetahui masalah yang dibahas, yaitu hakim.

##### **b. Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pengkajian literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Adapun sumber-sumbernya yaitu buku-buku, majalah, serta dokumen atau arsip yang berkaitan dengan masalah yang dibahas

## 2. Sumber Data

- a. Sumber Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu sumber data lapangan sebagai salah satu pertimbangan hukum dari para penegak hukum yang menangani kasus ini.
- b. Sumber Penelitian Kepustakaan (*Library research*), yaitu sumber data yang diperoleh dari hasil penelaahan beberapa literatur dan sumber bacaan lainnya yang dapat mendukung penulisan ini.

## C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan Penulis dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Untuk jenis data primer, Penulis melakukan pengumpulan data dengan metode interview atau wawancara terhadap hakim guna memperoleh data dan informasi yang akurat yang berkaitan dengan pembahasan ini.
2. Untuk data sekunder, Penulis melakukan penelitian kepustakaan untuk mencari data tambahan guna menunjang keberhasilan penulisan ini. Dalam hal ini data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan antara lain bersumber dari:
  - a. Buku-buku, majalah, tulisan ilmiah, dan yang berhubungan dengan objek penelitian.

- b. Peraturan perundang-undangan dan konvensi-konvensi internasional yang berhubungan dengan objek penelitian.

#### **D. Analisis Data**

Data yang diperoleh baik secara primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif, lalu dilakukan deskriptif data untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penerapan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pengrusakan Barang dalam Putusan Nomor 1309/Pid.B/2012/PN.Mks.**

Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupa mencari dan membuktikan kebenaran hukum materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta memegang teguh surat dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sebelum Penulis menguraikan mengenai tepat atau tidaknya penerapan hukum pidana terhadap tindak pengrusakan barang dalam Putusan Nomor 1309/Pid.B/2012/PN.Mks, maka perlu diketahui terlebih dahulu Posisi kasus, dakwaan JPU, tuntutan Penuntut Umum, dan Amar Putusan, yang Penulis akan uraikan sebagai berikut:

##### **1. Posisi Kasus**

Delik pengrusakan ini terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2012 sekitar jam 10.00 wita dan hari Kamis tanggal 07 Juni 2012 sekitar pukul 15.00 wita serta pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012 sekitar pukul 15.00 wita, dan pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 pukul 11.00 wita, bertempat di Jl. Biring Romang, Kel. Kapasa, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar tepatnya di kampus UKIP Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang dapat dilihat atau dilalui umum atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili para terdakwa

dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika antara perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya para terdakwa bersama dengan Lk. Bartholemeus dan Lk. Yansi Tambaru mempertanyakan perihal proposal permintaan dana taktis yang diajukan oleh para terdakwa bersama-sama dengan Lk. Bartholemeus untuk kegiatan mahasiswa dari Himpunan Anak Teknik Mesin kepada saksi Agus Salim selaku PR III, namun permintaan tersebut oleh saksi Agus Salim tidak dipenuhi sehingga para terdakwa bersama-sama dengan sejumlah mahasiswa lainnya yang tergabung dalam Mahasiswa Teknik Mesin tidak terima atas penolakan tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2012, para terdakwa bersama dengan Lk. Bartholemeus dan beberapa orang lainnya dengan sejumlah 20 (dua puluh) orang memaksa masuk ke dalam ruangan Rektor UKIP, namun usaha tersebut dihalangi oleh saksi Allin dan beberapa staf Kampus UKIP sehingga para terdakwa dan Lk. Bartholemeus serta beberapa orang lainnya dengan jumlah sekitar 20 (dua puluh) orang tertahan di ruangan saksi Allin, dan merasa terhalang untuk masuk kedalam ruangan Rektor UKIP terdakwa II Gidion Grace kemudian menarik salah satu kursi yang ada di ruangan tersebut, dan diwaktu yang hampir bersamaan 2 (dua) orang mahasiswa lainnya yang tidak diketahui

dengan pasti identitasnya juga menarik masing-masing 1 (satu) kursi, setelah itu terdakwa I Aprianus dengan dibantu oleh beberapa orang mahasiswa lainnya yang juga tidak diketahui dengan pasti identitasnya dan dibantu oleh Lk. Bartholemeus menarik meja saksi Allin yang di atasnya terdapat komputer yang terlebih dahulu telah diletakkan oleh para terdakwa di bawah lantai. Selanjutnya kursi dan meja tersebut ditarik keluar ruangan melalui ruangan loby setelah itu disimpan di halaman depan kantin dan terdapat meja kerja saksi Allin oleh mahasiswa dijadikan sebagai tempat orasi, sedangkan kursi-kursi tersebut dibakar oleh peserta unjuk rasa, dan tidak berselang lama kemudian Lk. Bartholemeus bersama dengan para terdakwa dan sejumlah peserta unjuk rasa lainnya kembali mencoba masuk ke dalam ruangan rektor dengan cara membobol pintu samping ruangan rektor yang terbuat dari kayu dan setelah berhasil masuk ke dalam ruangan tersebut para peserta unjuk rasa kemudian melampiaskan kemarahannya dengan merusak dan menghancurkan semua yang ada di dalam ruangan rektor berupa meja kerja dan kursi serta beberapa barang lainnya, dan sekira pukul 12.30 wita, saksi Prof. Dr. Pasolang Pasapang, S.H., M.H. selaku rektor UKIP tiba di gedung rektorat dan langsung menemui peserta unjuk rasa di loby rektorat dan dalam pertemuan tersebut saksi Prof. Dr. Pasolang Pasapang, S.H., M.H. menyampaikan rasa kekecewaannya atas tindakan anarkisme peserta unjuk rasa, namun dari pihak peserta unjuk rasa pada saat tersebut yang diwakili oleh terdakwa I Aprianus dan Lk. Yansi serta Lk. Bartholemeus

malah meminta surat pengunduran diri dari saksi Agus Salim selaku PR III.

Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2012, sekitar pukul 10 wita para terdakwa bersama Lk. Bartholemeus, Lk. Yansi, Paris Tulak, Jeheskiel, Lk. Ardyanto, Lk. Eben, Lk. Gonna, Lk. Arnol, Lk. Yogi, Lk Ippang dan sejumlah peserta unjuk rasa lainnya kembali melakukan aksi unjuk rasa di dalam Kampus UKIP dan aksi tersebut kemudian berakhir dengan tindakan anarkisme, dimana beberapa orang diantara peserta unjuk rasa kembali melakukan kekerasan terhadap gedung rektorat dengan cara melempari kaca jendela gedung rektorat lantai satu dan dua yang mengakibatkan kaca jendela gedung rektorat tersebut menjadi pecah.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012, sekitar pukul 16.00 wita, saksi Achmat Thomas yang saat itu sedang mengecet dengan dibantu oleh Lk. Korpis, PR I dan Lk. Atus serta Lk. Robert dan saksi Petrus Manna didatangi oleh Lk. Bartholemeus bersama-sama dengan teman-temannya yang merupakan mahasiswa Teknik Mesin termasuk para terdakwa, Lk. Yansi, Lk. Jeki, Lk. Paris dengan sejumlah sekitar 10 (sepuluh) orang dan menyampaikan kepada saksi Achmad Thomas untuk menghentikan kegiatan tersebut dikarenakan persoalan kampus tersebut belum selesai, setelah disampaikan Lk. Bartholemeus kemudian berorasi di dalam gedung rektorat dan tidak berselang lama kemudian sekitar sejumlah 20 orang masuk ke dalam gedung rektorat dan langsung



melakukan pengrusakan terhadap kaca-kaca jendela ruang LPM dan kaca-kaca jendela PR I dan ruang Penjamin Mutu yang berada di lantai dua dan kaca kamar mandi dengan menggunakan batu dan beberapa peserta unjuk rasa lainnya menggunakan potongan besi setelah itu peserta unjuk rasa tersebut kembali keluar gedung rektorat dan dengan menggunakan batu, peserta unjuk rasa kemudian kembali melempari jendela bagian depan lantai II gedung Rektorat termasuk Lk. Bartholemeus dan terdakwa I Aprianus yang melakukan pelemparan dengan menggunakan batu dan setelah melakukan pelemparan peserta unjuk rasa tersebut kembali berkumpul di depan pintu gerbang, namun terlebih dahulu mengangkat meja dan setelah berada di depan pintu gerbang, meja tersebut dibakar bersama dengan spanduk penerimaan maba dan denah lokasi kampus sambil terdakwa I Aprianus dan Lk. Bartholemeus serta Lk. Paris mengumpulkan teman-temannya dan melakukan orasi hingga sekitar pukul 22.00 wita. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012, dimulai sejak pukul 12.00 wita hingga pukul 15.30 wita, para peserta unjuk rasa lainnya kembali melakukan aksi pengrusakan terhadap fasilitas kampus yaitu pengrusakan terhadap ruangan rektor dan ruangan PR II serta ruang Fakultas Ekonomi dimana di dalam ruang rektor peserta unjuk rasa merusak meja, pintu kaca serta jendela-jendela di ruang tersebut dan kursi yang ada di ruangan tersebut juga ikut dirusak dengan cara sebagiannya dibakar di dalam ruangan tersebut dan sebagian lainnya diangkat keluar ruangan untuk dibakar

sementara itu peserta unjuk rasa juga melakukan pengrusakan di Ruang PR II dengan cara merusak fasilitas yang terdapat dalam ruangan tersebut berupa komputer, meja, dan kursi serta lemari, selanjutnya peserta unjuk rasa juga melakukan pengrusakan di Ruang Dekan Fakultas Ekonomi dengan cara merusak kursi, meja dan pintu kaca serta komputer dan juga melakukan pengrusakan di Ruang LPPM dengan cara merusak kursi, meja, lemari serta Printer dan AC yang terdapat di setiap ruangan dan kemudian melakukan pengrusakan terhadap Ruang Foto Copy dengan cara merusak mesin foto copy bersama dengan Komputer LMP yang saat berada di dalam Ruang foto copy tersebut dan khusus untuk Terdakwa II GIDION GRACE kemudian melakukan pengrusakan terhadap jendela kaca gedung rektorat kampus UKIP dengan menggunakan potongan besi sebanyak beberapa kali yang mengakibatkan kaca jendela tersebut menjadi pecah yang dilakukan pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012, sekitar pukul 11.00 wita;

Akibat perbuatan para terdakwa menyebabkan gedung rektorat kampus UKIP Makassar dan sejumlah peralatan kantor lainnya berupa meja, kursi, Komputer dan AC mengalami kerusakan dan tidak dapat dipakai lagi sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak kampus UKIP Makassar setidaknya sebesar Rp. 500.000.000, (Lima Ratus Juta Rupiah).

## **2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU)**

Surat dakwaan merupakan dasar atau landasan pemeriksaan perkara dalam sidang di pengadilan. Oleh karena itu JPU harus bersikap cermat/teliti terutama yang berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi kekurangan dan atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau unsur-unsur dalam dakwaan tidak berhasil dibuktikan. JPU juga harus mampu merumuskan unsur-unsur tindak pidana/delik yang didakwakan secara jelas, dalam artian rumusan unsur-unsur delik harus dapat dipadukan dan dijelaskan dalam bentuk uraian fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan kata lain uraian unsur-unsur delik yang dirumuskan dalam pasal yang didakwakan harus dapat dijelaskan/digambarkan dalam bentuk fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga dalam uraian unsur-unsur dakwaan dapat diketahui secara jelas apakah terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut sebagai pelaku (*pleger*), pelaku peserta (*medepleger*), penggerak (*uitlokker*), penyuruh (*doen pleger*) atau hanya sebagai pembantu.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP, tidak pernah diatur berkenaan dengan bentuk dan susunan dari surat dakwaan. Sehingga dalam praktek hukum, masing-masing penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan pada umumnya dipengaruhi oleh strategi dan rasa seni sesuai dengan pengalaman prakteknya masing-masing, namun demikian tetap

berdasarkan pada persyaratan yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP.

Dalam perkara Nomor 1309/Pid.B/2012/PN.Mks ini, JPU menggunakan dakwaan Alternatif. Dakwaan berbentuk alternatif yaitu yang didakwakan adalah beberapa delik, tetapi sesungguhnya dakwaan yang dituju dan yang harus dibuktikan hanya satu tindak pidana. Jadi terserah kepada Majelis Hakim tindakan mana yang dinilai telah berhasil dibuktikan di depan pengadilan tanpa terkait pada urutan dari tindak pidana yang didakwakan.

a. Dakwaan Kesatu

Bahwa ia terdakwa I. Aprianus Pasudung Alias Karca Alias Apri dan terdakwa II Gidion Grace Pangendongan, bersama-sama dengan Lk. Bartholemeus Patadungan Pulle Alias Barto, Lk. Yansi Ta'bi Tambaru, Paris Tulak, Jeheskiel W. Gwrimu Alias Jeki, Lk. Ardyanto Menduruk Alias Ian, Lk. Eben, Lk. Gonna, Lk. Arnol, Lk. Yogi, Lk. Ippang (masing-masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)), pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2012 sekitar jam 10.00 wita dan hari Kamis tanggal 07 Juni 2012 sekitar pukul 15.00 wita serta pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012 sekitar pukul 15.00 wita, dan pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 pukul 11.00 wita, bertempat di Jl. Biring Romang, Kel. Kapasa, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar tepatnya di kampus UKIP Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang dapat dilihat atau dilalui umum atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili para terdakwa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika antara perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya para terdakwa bersama dengan Lk. Bartholemeus dan Lk. Yansi Tambaru mempertanyakan perihal proposal permintaan dana taktis yang diajukan oleh para terdakwa bersama-sama dengan Lk. Bartholemeus untuk kegiatan mahasiswa dari Himpunan Anak Teknik Mesin kepada saksi Agus Salim selaku PR III, namun permintaan tersebut oleh saksi Agus Salim tidak dipenuhi sehingga para terdakwa bersama-

sama dengan sejumlah mahasiswa lainnya yang tergabung dalam Mahasiswa Teknik Mesin tidak terima atas penolakan tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2012, para terdakwa bersama dengan Lk. Bartholemeus dan beberapa orang lainnya dengan sejumlah 20 (dua puluh) orang memaksa masuk ke dalam ruangan Rektor UKIP, namun usaha tersebut dihalangi oleh saksi Allin dan beberapa staf Kampus UKIP sehingga para terdakwa dan Lk. Bartholemeus serta beberapa orang lainnya dengan jumlah sekitar 20 (dua puluh) orang tertahan di ruangan saksi Allin, dan merasa terhalang untuk masuk kedalam ruangan Rektor UKIP terdakwa II Gidion Grace kemudian menarik salah satu kursi yang ada di ruangan tersebut, dan diwaktu yang hampir bersamaan 2 (dua) orang mahasiswa lainnya yang tidak diketahui dengan pasti identitasnya juga menarik masing-masing 1 (satu) kursi, setelah itu terdakwa I Aprianus dengan dibantu oleh beberapa orang mahasiswa lainnya yang juga tidak diketahui dengan pasti identitasnya dan dibantu oleh Lk. Bartholemeus menarik meja saksi Allin yang diatasnya terdapat komputer yang terlebih dahulu telah diletakkan oleh para terdakwa di bawah lantai dan selanjutnya kursi dan meja tersebut ditarik keluar ruangan melalui ruangan loby setelah itu disimpan di halaman depan kantin dan terdapat meja kerja saksi Allin oleh mahasiswa dijadikan sebagai tempat orasi sedangkan kursi-kursi tersebut dibakar oleh peserta unjuk rasa, dan tidak berselang lama kemudian Lk. Bartholemeus bersama dengan para terdakwa dan sejumlah peserta unjuk rasa lainnya kembali mencoba masuk kedalam ruangan rektor dengan cara membobol pintu samping ruangan rektor yang terbuat dari kayu dan setelah berhasil masuk kedalam ruangan tersebut para peserta unjuk rasa kemudian melampiaskan kemarahannya dengan merusak dan menghancurkan semua yang ada di dalam ruangan rektor berupa meja kerja dan kursi serta beberapa barang lainnya, dan sekira pukul 12.30 wita, saksi Prof. Dr. Pasolang Pasapang, S.H., M.H. selaku rektor UKIP tiba di gedung rektorat dan langsung menemui peserta unjuk rasa di loby rektorat dan dalam pertemuan tersebut saksi Prof. Dr. Pasolang Pasapang, S.H., M.H. menyampaikan rasa kekecewaannya atas tindakan anarkisme peserta unjuk rasa, namun dari pihak peserta unjuk rasa pada saat tersebut yang diwakili oleh terdakwa I Aprianus dan Lk. Yansi serta Lk. Bartholemeus malah meminta surat pengunduran diri dari saksi Agus Salim selaku PR III.

Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2012, sekitar pukul 10 wita para terdakwa bersama Lk. Bartholemeus, Lk. Yansi, Paris Tulak, Jeheskiel, Lk. Ardyanto, Lk. Eben, Lk. Gonna, Lk. Arnol, Lk. Yogi, Lk. Ippang dan sejumlah peserta unjuk rasa lainnya kembali melakukan aksi unjuk rasa di dalam Kampus UKIP dan aksi tersebut kemudian berakhir dengan tindakan anarkisme, dimana beberapa orang diantara peserta unjuk rasa kembali melakukan kekerasan terhadap gedung rektorat dengan cara melempari kaca jendela gedung rektorat lantai satu

dan dua yang mengakibatkan kaca jendela gedung rektorat tersebut menjadi pecah.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012, sekitar pukul 16.00 wita, saksi Achmat Thomas yang saat itu sedang mengecet dengan dibantu oleh Lk. Korpis, PR I dan Lk. Atus serta Lk. Robert dan saksi Petrus Manna didatangi oleh Lk. Bartholemeus bersama-sama dengan teman-temannya yang merupakan mahasiswa Teknik Mesin termasuk para terdakwa, Lk. Yansi, Lk. Jeki, Lk. Paris dengan sejumlah sekitar 10 (sepuluh) orang dan menyampaikan kepada saksi Achmad Thomas untuk menghentikan kegiatan tersebut dikarenakan persoalan kampus tersebut belum selesai, setelah disampaikan Lk. Bartholemeus kemudian berorasi di dalam gedung rektorat dan tidak berselang lama kemudian sekitar sejumlah 20 orang masuk ke dalam gedung rektorat dan langsung melakukan pengrusakan terhadap kaca-kaca jendela ruang LPM dan kaca-kaca jendela PR I dan ruang Penjamin Mutu yang berada di lantai dua dan kaca kamar mandi dengan menggunakan batu dan beberapa peserta unjuk rasa lainnya menggunakan potongan besi setelah itu peserta unjuk rasa tersebut kembali keluar gedung rektorat dan dengan menggunakan batu, peserta unjuk rasa kemudian kembali melempari jendela bagian depan lantai II gedung Rektorat termasuk Lk. Bartholemeus dan terdakwa I Aprianus yang melakukan pelemparan dengan menggunakan batu dan setelah melakukan pelemparan peserta unjuk rasa tersebut kembali berkumpul di depan pintu gerbang, namun terlebih dahulu mengangkat meja dan setelah berada di depan pintu gerbang, meja tersebut dibakar bersama dengan spanduk penerimaan maba dan denah lokasi kampus sambil terdakwa I Aprianus dan Lk. Bartholemeus serta Lk. Paris mengumpulkan teman-temannya dan melakukan orasi hingga sekitar pukul 22.00 wita. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012, dimulai sejak pukul 12.00 wita hingga pukul 15.30 wita, para peserta unjuk rasa lainnya kembali melakukan aksi pengrusakan terhadap fasilitas kampus yaitu pengrusakan terhadap ruangan rektor dan ruangan PR II serta ruang Fakultas Ekonomi dimana di dalam ruang rektor peserta unjuk rasa merusak meja, pintu kaca serta jendela-jendela di ruang tersebut dan kursi yang ada di ruangan tersebut juga ikut dirusak dengan cara sebagiannya dibakar di dalam ruangan tersebut dan sebagian lainnya diangkat keluar ruangan untuk dibakar sementara itu peserta unjuk rasa juga melakukan pengrusakan di Ruang PR II dengan cara merusak fasilitas yang terdapat dalam ruangan tersebut berupa komputer, meja, dan kursi serta lemari, selanjutnya peserta unjuk rasa juga melakukan pengrusakan di Ruang Dekan Fakultas Ekonomi dengan cara merusak kursi, meja dan pintu kaca serta komputer dan juga melakukan pengrusakan di Ruang LPPM dengan cara merusak kursi, meja, lemari serta Printer dan AC yang terdapat di setiap ruangan dan kemudian melakukan pengrusakan terhadap Ruang Foto Copy dengan cara merusak mesin foto copy bersama dengan Komputer LMP yang saat berada di dalam Ruang foto

copy tersebut dan khusus untuk Terdakwa II GIDION GRACE kemudian melakukan pengrusakan terhadap jendela kaca gedung rektorat kampus UKIP dengan menggunakan potongan besi sebanyak beberapa kali yang mengakibatkan kaca jendela tersebut menjadi pecah yang dilakukan pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012, sekitar pukul 11.00 wita;

Akibat perbuatan para terdakwa menyebabkan gedung rektorat kampus UKIP Makassar dan sejumlah peralatan kantor lainnya berupa meja, kursi, Komputer dan AC mengalami kerusakan dan tidak dapat dipakai lagi sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak kampus UKIP Makassar setidaknya sebesar Rp. 500.000.000, (Lima Ratus Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 ayat (1) KUHP, Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

b. Dakwaan Kedua

Bahwa ia terdakwa I. Aprianus Pasudung Alias Karca Alias Apri dan terdakwa II Gidion Grace Pangendongan, bersama-sama dengan Lk. Bartholemeus Patadungan Pulle Alias Barto, Lk. Yansi Ta'bi Tambaru, Paris Tulak, Jeheskiel W. Gwrimu Alias Jeki, Lk. Ardyanto Menduruk Alias Ian, Lk. Eben, Lk. Gonna, Lk. Arnol, Lk. Yogi, Lk. Ippang (masing-masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)), Bahwa ia terdakwa I. Aprianus Pasudung Alias Karca Alias Apri dan terdakwa II Gidion Grace Pangendongan, bersama-sama dengan Lk. Bartholemeus Patadungan Pulle Alias Barto, Lk. Yansi Ta'bi Tambaru, Paris Tulak, Jeheskiel W. Gwrimu Alias Jeki, Lk. Ardyanto Menduruk Alias Ian, Lk. Eben, Lk. Gonna, Lk. Arnol, Lk. Yogi, Lk. Ippang (masing-masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)), pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2012 sekitar jam 10.00 wita dan hari Kamis tanggal 07 Juni 2012 sekitar pukul 15.00 wita serta pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012 sekitar pukul 15.00 wita, dan pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 pukul 11.00 wita, bertempat di Jl. Biring Romang, Kel. Kapasa, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar tepatnya di kampus UKIP Makassar atau setidaknya pada tempat tertentu yang dapat dilihat atau dilalui umum atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili para terdakwa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika antara perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya para terdakwa bersama dengan Lk. Bartholemeus dan Lk. Yansi Tambaru mempertanyakan perihal proposal permintaan dana taktis yang diajukan oleh para terdakwa bersama-sama dengan Lk. Bartholemeus untuk kegiatan mahasiswa dari Himpunan Anak Teknik

Mesin kepada saksi Agus Salim selaku PR III, namun permintaan tersebut oleh saksi Agus Salim tidak dipenuhi sehingga para terdakwa bersama-sama dengan sejumlah mahasiswa lainnya yang tergabung dalam Mahasiswa Teknik Mesin tidak terima atas penolakan tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2012, para terdakwa bersama dengan Lk. Bartholemeus dan beberapa orang lainnya dengan sejumlah 20 (dua puluh) orang memaksa masuk ke dalam ruangan Rektor UKIP, namun usaha tersebut dihalangi oleh saksi Allin dan beberapa staf Kampus UKIP sehingga para terdakwa dan Lk. Bartholemeus serta beberapa orang lainnya dengan jumlah sekitar 20 (dua puluh) orang tertahan di ruangan saksi Allin, dan merasa terhalang untuk masuk kedalam ruangan Rektor UKIP terdakwa II Gidion Grace kemudian menarik salah satu kursi yang ada di ruangan tersebut, dan diwaktu yang hampir bersamaan 2 (dua) orang mahasiswa lainnya yang tidak diketahui dengan pasti identitasnya juga menarik masing-masing 1 (satu) kursi, setelah itu terdakwa I Aprianus dengan dibantu oleh beberapa orang mahasiswa lainnya yang juga tidak diketahui dengan pasti identitasnya dan dibantu oleh Lk. Bartholemeus menarik meja saksi Allin yang diatasnya terdapat komputer yang terlebih dahulu telah diletakkan oleh para terdakwa di bawah lantai dan selanjutnya kursi dan meja tersebut ditarik keluar ruangan melalui ruangan loby setelah itu disimpan di halaman depan kantin dan terdapat meja kerja saksi Allin oleh mahasiswa dijadikan sebagai tempat orasi sedangkan kursi-kursi tersebut dibakar oleh peserta unjuk rasa, dan tidak berselang lama kemudian Lk. Bartholemeus bersama dengan para terdakwa dan sejumlah peserta unjuk rasa lainnya kembali mencoba masuk kedalam ruangan rektor dengan cara membobol pintu samping ruangan rektor yang terbuat dari kayu dan setelah berhasil masuk kedalam ruangan tersebut para peserta unjuk rasa kemudian melampiaskan kemarahannya dengan merusak dan menghancurkan semua yang ada di dalam ruangan rektor berupa meja kerja dan kursi serta beberapa barang lainnya, dan sekira pukul 12.30 wita, saksi Prof. Dr. Pasolang Pasapang, S.H., M.H. selaku rektor UKIP tiba di gedung rektorat dan langsung menemui peserta unjuk rasa di loby rektorat dan dalam pertemuan tersebut saksi Prof. Dr. Pasolang Pasapang, S.H., M.H. menyampaikan rasa kekecewaannya atas tindakan anarkisme peserta unjuk rasa, namun dari pihak peserta unjuk rasa pada saat tersebut yang diwakili oleh terdakwa I Aprianus dan Lk. Yansi serta Lk. Bartholemeus malah meminta surat pengunduran diri dari saksi Agus Salim selaku PR III.

Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2012, sekitar pukul 10 wita para terdakwa bersama Lk. Bartholemeus, Lk. Yansi, Paris Tulak, Jeheskiel, Lk. Ardyanto, Lk. Eben, Lk. Gonna, Lk. Arnol, Lk. Yogi, Lk. Ippang dan sejumlah peserta unjuk rasa lainnya kembali melakukan aksi unjuk rasa di dalam Kampus UKIP dan aksi tersebut kemudian berakhir dengan tindakan anarkisme, dimana beberapa orang diantara peserta unjuk rasa kembali melakukan kekerasan terhadap gedung



rektorat dengan cara melempari kaca jendela gedung rektorat lantai satu dan dua yang mengakibatkan kaca jendela gedung rektorat tersebut menjadi pecah.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012, sekitar pukul 16.00 wita, saksi Achmat Thomas yang saat itu sedang mengecet dengan dibantu oleh Lk. Korpis, PR I dan Lk. Atus serta Lk. Robert dan saksi Petrus Manna didatangi oleh Lk. Bartholemeus bersama-sama dengan teman-temannya yang merupakan mahasiswa Teknik Mesin termasuk para terdakwa, Lk. Yansi, Lk. Jeki, Lk. Paris dengan sejumlah sekitar 10 (sepuluh) orang dan menyampaikan kepada saksi Achmad Thomas untuk menghentikan kegiatan tersebut dikarenakan persoalan kampus tersebut belum selesai, setelah disampaikan Lk. Bartholemeus kemudian berorasi di dalam gedung rektorat dan tidak berselang lama kemudian sekitar sejumlah 20 orang masuk ke dalam gedung rektorat dan langsung melakukan pengrusakan terhadap kaca-kaca jendela ruang LPM dan kaca-kaca jendela PR I dan ruang Penjamin Mutu yang berada di lantai dua dan kaca kamar mandi dengan menggunakan batu dan beberapa peserta unjuk rasa lainnya menggunakan potongan besi setelah itu peserta unjuk rasa tersebut kembali keluar gedung rektorat dan dengan menggunakan batu, peserta unjuk rasa kemudian kembali melempari jendela bagian depan lantai II gedung Rektorat termasuk Lk. Bartholemeus dan terdakwa I Aprianus yang melakukan pelemparan dengan menggunakan batu dan setelah melakukan pelemparan peserta unjuk rasa tersebut kembali berkumpul di depan pintu gerbang, namun terlebih dahulu mengangkat meja dan setelah berada di depan pintu gerbang, meja tersebut dibakar bersama dengan spanduk penerimaan maba dan denah lokasi kampus sambil terdakwa I Aprianus dan Lk. Bartholemeus serta Lk. Paris mengumpulkan teman-temannya dan melakukan orasi hingga sekitar pukul 22.00 wita. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012, dimulai sejak pukul 12.00 wita hingga pukul 15.30 wita, para peserta unjuk rasa lainnya kembali melakukan aksi pengrusakan terhadap fasilitas kampus yaitu pengrusakan terhadap ruangan rektor dan ruangan PR II serta ruang Fakultas Ekonomi dimana di dalam ruang rektor peserta unjuk rasa merusak meja, pintu kaca serta jendela-jendela di ruang tersebut dan kursi yang ada di ruangan tersebut juga ikut dirusak dengan cara sebagiannya dibakar di dalam ruangan tersebut dan sebagian lainnya diangkat keluar ruangan untuk dibakar sementara itu peserta unjuk rasa juga melakukan pengrusakan di Ruang PR II dengan cara merusak fasilitas yang terdapat dalam ruangan tersebut berupa komputer, meja, dan kursi serta lemari, selanjutnya peserta unjuk rasa juga melakukan pengrusakan di Ruang Dekan Fakultas Ekonomi dengan cara merusak kursi, meja dan pintu kaca serta komputer dan juga melakukan pengrusakan di Ruang LPPM dengan cara merusak kursi, meja, lemari serta Printer dan AC yang terdapat di setiap ruangan dan kemudian melakukan pengrusakan terhadap Ruang Foto Copy dengan cara merusak mesin foto copy

bersama dengan Komputer LMP yang saat berada di dalam Ruang foto copy tersebut dan khusus untuk Terdakwa II GIDION GRACE kemudian melakukan pengrusakan terhadap jendela kaca gedung rektorat kampus UKIP dengan menggunakan potongan besi sebanyak beberapa kali yang mengakibatkan kaca jendela tersebut menjadi pecah yang dilakukan pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012, sekitar pukul 11.00 wita;

Akibat perbuatan para terdakwa menyebabkan gedung rektorat kampus UKIP Makassar dan sejumlah peralatan kantor lainnya berupa meja, kursi, Komputer dan AC mengalami kerusakan dan tidak dapat dipakai lagi sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak kampus UKIP Makassar setidaknya-tidaknya sebesar Rp. 500.000.000, (Lima Ratus Juta Rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 406 ayat (1) KUHP, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

### **3. Tuntutan Penuntut Umum**

Tuntutan Penuntut Umum merupakan permohonan Penuntut Umum kepada Majelis Hakim ketika hendak mengadili suatu perkara. Adapun tuntutan Penuntut Umum dalam Nomor Registrasi Perkara PDM-122/Mks/Ep.1/08/2012, yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I APRIANUS Alias KARCA Alias Apri dan Terdakwa II GIDION PANGENDONGAN Alias GIDION, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang yang dilakukan secara berlanjut”, melanggar Pasal 170 ayat (1) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa menjalani tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti, berupa:
  - 1 (satu) buah mesin AC, Merk Sharp;
  - 1 (satu) buah print/foto copy Merk Canon;
  - 1 (satu) buah dispenser Merk Miyako

- 1 (satu) buah rangka Aluminium
- 1 (satu) buah rangka kursi besi yang terbakar
- 1 (satu) buah kalkulator merk citizen
- 1 (satu) buah stand kunci pintu utama
- 2 (dua) buah pecahan kaca bening
- 2 (dua) batu gunung atau kali
- 3 (tiga) buah paping blok;

Diserahkan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam pembuktian atas nama terdakwa Bartholemeus;

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

#### **4. Amar Putusan**

Dalam perkara Nomor 1309/Pid.B/2012/PN.Mks Majelis Hakim memutuskan:

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa I APRIANUS Alias KARCA Alias Apri dan Terdakwa II GIDION PANGENDONGAN Alias GIDION, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'DIMUKA UMUM MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP BARANG YANG MENAKIBATKAN RUSAK'
2. Menghukum Terdakwa I APRIANUS alias KARCA alias APRI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 22 (dua puluh dua) hari, Dan Terdakwa II GIDION GRACE PANGENDONGAN alias GIDION, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 17 (tujuh belas) hari;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa
4. Menetapkan agar para terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Kelas 1 Kota Makassar.
5. Menetapkan barang bukti, berupa:
  - 1 (satu) buah mesin AC, Merk Sharp;
  - 1 (satu) buah print/foto copy Merk Canon;
  - 1 (satu) buah dispenser Merk Miyako
  - 1 (satu) buah rangka Aluminium
  - 1 (satu) buah rangka kursi besi yang terbakar
  - 1 (satu) buah kalkulator merk citizen
  - 1 (satu) buah stand kunci pintu utama
  - 2 (dua) buah pecahan kaca bening
  - 2 (dua) batu gunung atau kali

- 3 (tiga) buah paping blok, masing-masing dinyatakan dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan bagus penuntutan dalam perkara lainnya.
- 6. Membebani para terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

## **5. Analisis Penulis**

Dalam perkara Nomor: 1309/Pid.B/2012/PN.Mks ini, surat dakwaan JPU disusun secara alternatif, maka menjadi kewenangan dan keleluasaan majelis hakim memilih salah satu dakwaan yang paling sesuai untuk diterapkan dengan perbuatan terdakwa dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Dalam pertimbangan majelis hakim menyebutkan, apabila Pasal 170 ayat (1) KUHP, Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagai dakwaan kesatu dan Pasal 406 ayat (1) KUHP, Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagai dakwaan kedua kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka majelis hakim karena kewenangannya memilih untuk mempertimbangkan dakwaan kesatu Pasal 170 ayat (1) KUHP yang bagian inti delik, adalah “secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang”. Artinya bahwa majelis hakim lebih memilih Pasal 170 ayat (1) KUHP karena Pasal 170 ayat (1) inilah yang paling sesuai dengan perbuatan terdakwa dan dianggap paling sesuai dengan barang bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan.

Untuk menyatakan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan melawan hukum, maka

perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dalam hal ini Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Adapun unsur-unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur melakukan kekerasan;
3. Unsur dimuka umum atau terang-terangan;
4. Unsur bersama-sama;
5. Unsur ditujukan kepada barang yang mengakibatkan barang menjadi rusak; dan
6. Unsur perbuatan berlanjut.

Berikut pembuktian unsur-unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada terdakwa yaitu:

1. Unsur barangsiapa

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana serta mampu bertanggungjawab, artinya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan salah satu subyek yang dianggap sebagai subyek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terdakwa I Aprianus dan terdakwa II Gidion Grace dipersidangan, ternyata dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan penuntut umum dan majelis hakim dengan baik dan benar dan membenarkan identitas yang termaktub dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat lagi kekeliruan mengenai orangnya. Dengan demikian unsur barangsiapa menurut Penulis dalam perkara Nomor 1309/Pid.B/2012/PN.Mks telah terpenuhi.

## 2. Unsur melakukan kekerasan

Bahwa yang dilarang dalam unsure ini adalah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai kekerasan, yang dilakukan dapat mengakibatkan mati orang lain.

Unsur melakukan kekerasan dapat dilihat dari perbuatan terdakwa menendang daun pintu bagian samping ruang rektorat, sehingga pintu bagian samping ruang rektorat rusak dan jebol, selanjutnya pelaku aksi demonstran termasuk para terdakwa masuk dalam ruang rektor, selanjutnya terdakwa I Aprianus duduk dikursi rector dan menyatakan: enak jadi rektor, dan selanjutnya pada hari minggu tanggal 10 Juni 2012 sore hari, saksi Yosefine melihat terdakwa I Aprianus mengambil potongan kayu meja tersebut kemudian dengan kayu tersebut terdakwa merusak tanaman baik dalam pot maupun yang tertanam. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 sekitar jam 10.00 wita, saat saksi Allin baru tiba

di kampus UKIP, dari jarak 5 meter, saksi Allin melihat terdakwa II Gidion melakukan pengrusakan dengan cara memecah kaca-kaca yang sudah pecah dengan menggunakan potongan besi. Berdasarkan fakta-fakta inilah maka unsur melakukan kekerasan menurut Penulis telah terpenuhi.

### 3. Unsur dimuka umum atau terang-terangan

Yang dimaksud dalam unsur ini adalah kekerasan yang dilakukan di muka umum atau disebut dengan kejahatan terhadap ketertiban umum, yaitu perbuatan melakukan kekerasan tersebut terdakwa lakukan ditempat orang banyak (publik) dapat melihat.

Dari fakta-fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan bahwa benar tempat dimana perbuatan kekerasan tersebut dilakukan oleh para terdakwa adalah di dalam lingkungan Kampus UKIP Makassar di Jl. Biring Romang, Kel. Kapasa, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, tempat perbuatan kekerasan tersebut dilakukan adalah ditempat umum yaitu dimana orang banyak (publik) dapat melihat, dan perbuatan para terdakwa tersebut telah menimbulkan keresahan ditengah mahasiswa disekitar kampus UKIP Makassar. Maka perbuatan terdakwa tersebut dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap ketertiban umum. Sehingga dengan demikian unsur dimuka umum telah terpenuhi.

#### 4. Unsur bersama-sama

Yang dimaksud dengan bersama-sama dalam unsur ini adalah dua atau lebih orang bekerjasama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik.

Unsur bersama-sama dapat dilihat dari perbuatan terdakwa dengan mahasiswa pengunjung rasa lainnya dan dengan tenaga bersama dengan cara melakukan kekerasan terhadap barang berupa melakukan perbuatan menendang daun pintu bagian samping ruang rektorat, sehingga pintu bagian samping ruang rektorat rusak dan jebol, selanjutnya pelaku aksi demonstran termasuk para terdakwa masuk dalam ruang rektor, selanjutnya terdakwa I Aprianus duduk dikursi rektor dan menyatakan: enak jadi rektor, dan selanjutnya pada hari minggu tanggal 10 Juni 2012 sore hari, saksi Yosefine melihat terdakwa I Aprianus mengambil potongan kayu meja tersebut kemudian dengan kayu tersebut terdakwa merusak tanaman baik dalam pot maupun yang tertanam. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 sekitar jam 10.00 wita, saat saksi Allin baru tiba di kampus UKIP, dari jarak 5 meter, saksi Allin melihat terdakwa II Gidion melakukan pengrusakan dengan cara memecah kaca-kaca yang sudah pecah dengan menggunakan potongan besi. Dengan demikian unsur secara bersama-sama telah terpenuhi.



#### 5. Unsur ditujukan kepada barang yang mengakibatkan rusak

Dalam unsur ini, kekerasan yang dilakukan tersebut harus ditujukan kepada barang baik itu kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain, dalam unsur ini disyaratkan bahwa kekerasan dilakukan untuk mengganggu ketertiban umum.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat disimpulkan bahwa benar perbuatan kekerasan yang dilakukan para terdakwa terhadap barang-barang milik UKIP Makassar, berupa daun pintu dan kaca serta mencabut dengan tangan dan memukul dengan potongan kayu dan besi, adalah perbuatan kekerasan yang ditujukan terhadap barang yang mengakibatkan barang menjadi rusak dan tidak dapat dipakai lagi, berupa sehelai daun pintu samping ruang rektorat, kaca jendela dan tanaman bunga berikut potnya, dan dengan perbuatan kekerasan tersebut telah menimbulkan keresahan ditengah-tengah kehidupan kampus UKIP Makassar. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

#### 6. Unsur perbuatan berlanjut

Unsur perbuatan berlanjut dapat dilihat dari perbuatan para terdakwa bersama dengan sejumlah mahasiswa lainnya yang melakukan pengrusakan dimulai pada haru Rabu tanggal 06 Juni 2012, dan dilanjutkan pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012, serta pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 selama beberapa hari berasal dari suatu pelaksanaan keputusan yang terlarang menurut undang-undang, oleh

karenanya itu perbuatan para terdakwa tersebut telah melahirkan beberapa tindak pidana yang sejenis yaitu tindak pidana dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang, dan antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain tidak dipisahkan suatu jangka yang relatif cukup lama. Dengan demikian unsur perbuatan berlanjut telah terpenuhi.

Oleh karena semua unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan terbukti seluruhnya maka kesimpulan majelis hakim yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang tersebut dalam dakwaan kesatu penuntut umum menurut Penulis sudah tepat.

**B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengrusakan Barang dalam Putusan Nomor 1309/Pid.B/2012/PN.Mks.**

Pengambilan keputusan sangatlah diperlukan oleh hakim dalam membuat keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai, maka hakim harus mengambil keputusan yang sesuai. Hal ini sangat perlu untuk menciptakan putusan yang proporsional dan mendekati rasa keadilan, baik itu dari segi pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, maupun masyarakat. Untuk itu sebelum menjatuhkan sanksi pidana, hakim melakukan tindakan untuk menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan

kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada (fakta persidangan) dan disertai keyakinannya setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya Majelis Hakim mengambil kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus Perkara Nomor 1309/Pid.B/2012/PN.Mks, Penulis membagi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis.

### **1. Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang memandang hukum sebagai suatu sistem yang utuh yang mencakupi fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan aturan-aturan hukum.

Berikut fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim

1. Bahwa benar terjadi pengrusakan pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2012 sekitar jam 10.00 wita dan hari Kamis tanggal 07 Juni 2012 sekitar pukul 15.00 wita serta pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012 sekitar pukul 15.00 wita, dan pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 pukul 11.00 wita, bertempat di Jl. Biring Romang, Kel. Kapasa, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar tepatnya di kampus UKIP Makassar atau setidaknya pada tempat tertentu yang dapat dilihat atau dilalui umum atau setidaknya

tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar.

2. Bahwa benar yang melakukan perbuatan pengrusakan adalah terdakwa I Aprianus, Terdakwa II Gidion, bersama-sama dengan Lk. Bartholemeus, Lk. Yansi, Paris Tulak, Jeheskiel, Lk. Ardyanto, Lk. Eben, Lk. Gonna, Lk. Arnol, Lk. Yogi, dan Lk. Ippang (masing-masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang).
3. Bahwa benar pada awalnya para terdakwa bersama dengan Lk. Bartholemeus dan Lk. Yansi Tambaru mempertanyakan perihal proposal permintaan dana taktis yang diajukan oleh para terdakwa bersama-sama dengan Lk. Bartholemeus untuk kegiatan mahasiswa dari Himpunan Anak Teknik Mesin kepada saksi Agus Salim selaku PR III, namun permintaan tersebut oleh saksi Agus Salim tidak dipenuhi sehingga para terdakwa bersama-sama dengan sejumlah mahasiswa lainnya yang tergabung dalam Mahasiswa Teknik Mesin tidak terima atas penolakan tersebut.
4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2012, para terdakwa bersama dengan Lk. Bartholemeus dan beberapa orang lainnya dengan sejumlah 20 (dua puluh) orang memaksa masuk ke dalam ruangan Rektor UKIP, namun usaha tersebut dihalangi oleh saksi Allin dan beberapa staf Kampus UKIP sehingga para terdakwa dan Lk. Bartholemeus serta beberapa orang lainnya dengan jumlah sekitar 20 (dua puluh) orang tertahan di ruangan saksi Allin.
5. Bahwa benar terdakwa II Gidion Grace kemudian menarik salah satu kursi yang ada di ruangan tersebut, dan diwaktu yang hampir bersamaan 2 (dua) orang mahasiswa lainnya yang tidak diketahui dengan pasti identitasnya juga menarik masing-masing 1 (satu) kursi, setelah itu terdakwa I Aprianus dengan dibantu oleh beberapa orang mahasiswa lainnya yang juga tidak diketahui dengan pasti identitasnya dan dibantu oleh Lk. Bartholemeus menarik meja saksi Allin yang di atasnya terdapat komputer yang terlebih dahulu telah diletakkan oleh para terdakwa di bawah lantai dan selanjutnya kursi dan meja tersebut ditarik keluar ruangan melalui ruangan loby setelah itu disimpan di halaman depan kantin dan terdapat meja kerja saksi Allin oleh mahasiswa dijadikan sebagai tempat orasi sedangkan kursi-kursi tersebut dibakar oleh peserta unjuk rasa, dan tidak berselang lama kemudian Lk. Bartholemeus bersama dengan para terdakwa dan sejumlah peserta unjuk rasa lainnya kembali mencoba masuk kedalam ruangan rektor dengan cara membobol pintu samping ruangan rektor yang terbuat dari kayu dan setelah berhasil masuk kedalam ruangan tersebut para peserta unjuk rasa kemudian melampiaskan kemarahannya dengan merusak dan menghancurkan semua yang ada di

dalam ruangan rektor berupa meja kerja dan kursi serta beberapa barang lainnya.

6. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2012, sekitar pukul 10 wita para terdakwa bersama Lk. Bartholemeus, Lk. Yansi, Paris Tulak, Jeheskiel, Lk. Ardyanto, Lk. Eben, Lk. Gonna, Lk. Arnol, Lk. Yogi, Lk. Ippang dan sejumlah peserta unjuk rasa lainnya kembali melakukan aksi unjuk rasa di dalam Kampus UKIP dan aksi tersebut kemudian berakhir dengan tindakan anarkisme, dimana beberapa orang diantara peserta unjuk rasa kembali melakukan kekerasan terhadap gedung rektorat dengan cara melempari kaca jendela gedung rektorat lantai satu dan dua yang mengakibatkan kaca jendela gedung rektorat tersebut menjadi pecah.
7. Bahwa benar, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012, sekitar pukul 16.00 wita, saksi Achmat Thomas yang saat itu sedang mengecet dengan dibantu oleh Lk. Korpis, PR I dan Lk. Atus serta Lk. Robert dan saksi Petrus Manna didatangi oleh Lk. Bartholemeus bersama-sama dengan teman-temannya yang merupakan mahasiswa Teknik Mesin termasuk para terdakwa, Lk. Yansi, Lk. Jeki, Lk. Paris dengan sejumlah sekitar 10 (sepuluh) orang dan menyampaikan kepada saksi Achmad Thomas untuk menghentikan kegiatan tersebut dikarenakan persoalan kampus tersebut belum selesai, setelah disampaikan Lk. Bartholemeus kemudian berorasi di dalam gedung rektorat dan tidak berselang lama kemudian sekitar sejumlah 20 orang masuk ke dalam gedung rektorat dan langsung melakukan pengrusakan terhadap kaca-kaca jendela ruang LPM dan kaca-kaca jendela PR I dan ruang Penjamin Mutu yang berada di lantai dua dan kaca kamar mandi dengan menggunakan batu dan beberapa peserta unjuk rasa lainnya menggunakan potongan besi setelah itu peserta unjuk rasa tersebut kembali keluar gedung rektorat dan dengan menggunakan batu, peserta unjuk rasa kemudian kembali melempari jendela bagian depan lantai II gedung Rektorat termasuk Lk. Bartholemeus dan terdakwa I Aprianus yang melakukan pelemparan dengan menggunakan batu dan setelah melakukan pelemparan peserta unjuk rasa tersebut kembali berkumpul di depan pintu gerbang, namun terlebih dahulu mengangkat meja dan setelah berada di depan pintu gerbang, meja tersebut dibakar bersama dengan spanduk penerimaan maba dan denah lokasi kampus sambil terdakwa I Aprianus dan Lk. Bartholemeus serta Lk. Paris mengumpulkan teman-temannya dan melakukan orasi hingga sekitar pukul 22.00 wita.
8. Bahwa benar, selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012, dimulai sejak pukul 12.00 wita hingga pukul 15.30 wita, para peserta unjuk rasa lainnya kembali melakukan aksi

pengrusakan terhadap fasilitas kampus yaitu pengrusakan terhadap ruangan rektor dan ruangan PR II serta ruang Fakultas Ekonomi dimana di dalam ruang rektor peserta unjuk rasa merusak meja, pintu kaca serta jendela-jendela di ruang tersebut dan kursi yang ada di ruangan tersebut juga ikut dirusak dengan cara sebagiannya dibakar di dalam ruangan tersebut dan sebagian lainnya diangkat keluar ruangan untuk dibakar sementara itu peserta unjuk rasa juga melakukan pengrusakan di Ruang PR II dengan cara merusak fasilitas yang terdapat dalam ruangan tersebut berupa komputer, meja, dan kursi serta lemari, selanjutnya peserta unjuk rasa juga melakukan pengrusakan di Ruang Dekan Fakultas Ekonomi dengan cara merusak kursi, meja dan pintu kaca serta komputer dan juga melakukan pengrusakan di Ruang LPPM dengan cara merusak kursi, meja, lemari serta Printer dan AC yang terdapat di setiap ruangan dan kemudian melakukan pengrusakan terhadap Ruang Foto Copy dengan cara merusak mesin foto copy bersama dengan Komputer LMP yang saat berada di dalam Ruang foto copy tersebut dan khusus untuk Terdakwa II GIDION GRACE kemudian melakukan pengrusakan terhadap jendela kaca gedung rektorat kampus UKIP dengan menggunakan potongan besi sebanyak beberapa kali yang mengakibatkan kaca jendela tersebut menjadi pecah.

9. Bahwa benar, akibat perbuatan para terdakwa menyebabkan gedung rektorat kampus UKIP Makassar dan sejumlah peralatan kantor lainnya berupa meja, kursi, Komputer dan AC mengalami kerusakan dan tidak dapat dipakai lagi sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak kampus UKIP Makassar setidaknya sebesar Rp. 500.000.000, (Lima Ratus Juta Rupiah).

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah disebutkan di atas, kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan apakah seseorang telah dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana atau tidak yang didakwakan kepada terdakwa, maka keseluruhan dari unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh JPU kepada terdakwa haruslah dapat dibuktikan dan terpenuhi seluruhnya.

Adapun unsur-unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1)

KUHP yang didakwakan kepada terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa
2. Unsur melakukan kekerasan
3. Unsur dimuka umum atau terang-terangan
4. Unsur bersama-sama
5. Unsur ditujukan kepada barang yang mengakibatkan barang menjadi rusak
6. Unsur perbuatan berlanjut.

Berikut pembuktian unsur-unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada terdakwa yaitu:

1. Unsur barangsiapa

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana serta mampu bertanggungjawab, artinya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan salah satu subyek yang dianggap sebagai subyek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terdakwa I Aprianus dan terdakwa II Gidion Grace dipersidangan, ternyata dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan penuntut umum dan majelis hakim dengan baik dan benar dan membenarkan identitas yang termaktub dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat lagi kekeliruan mengenai

orangnya. Dengan demikian unsur barang siapa menurut Penulis dalam perkara Nomor 1309/Pid.B/2012/PN.Mks telah terpenuhi.

## 2. Unsur melakukan kekerasan

Bahwa yang dilarang dalam unsure ini adalah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai kekerasan, yang dilakukan dapat mengakibatkan mati orang lain.

Unsur melakukan kekerasan dapat dilihat dari perbuatan terdakwa menendang daun pintu bagian samping ruang rektorat, sehingga pintu bagian samping ruang rektorat rusak dan jebol, selanjutnya pelaku aksi demonstran termasuk para terdakwa masuk dalam ruang rektor, selanjutnya terdakwa I Aprianus duduk dikursi rektor dan menyatakan: enak jadi rektor, dan selanjutnya pada hari minggu tanggal 10 Juni 2012 sore hari, saksi Yosefine melihat terdakwa I Aprianus mengambil potongan kayu meja tersebut kemudian dengan kayu tersebut terdakwa merusak tanaman baik dalam pot maupun yang tertanam. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 sekitar jam 10.00 wita, saat saksi Allin baru tiba di kampus UKIP, dari jarak 5 meter, saksi Allin melihat terdakwa II Gidion melakukan pengrusakan dengan cara memecah kaca-kaca yang sudah pecah dengan menggunakan potongan besi. Berdasarkan fakta-fakta inilah maka unsur melakukan kekerasan menurut Penulis telah terpenuhi.



### 3. Unsur dimuka umum atau terang-terangan

Yang dimaksud dalam unsur ini adalah kekerasan yang dilakukan di muka umum atau disebut dengan kejahatan terhadap ketertiban umum, yaitu perbuatan melakukan kekerasan tersebut terdakwa lakukan ditempat orang banyak (publik) dapat melihat.

Dari fakta-fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan bahwa benar tempat dimana perbuatan kekerasan tersebut dilakukan oleh para terdakwa adalah di dalam lingkungan Kampus UKIP Makassar di Jl. Biring Romang, Kel. Kapasa, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, tempat perbuatan kekerasan tersebut dilakukan adalah ditempat umum yaitu dimana orang banyak (publik) dapat melihat, dan perbuatan para terdakwa tersebut telah menimbulkan keresahan ditengah mahasiswa disekitar kampus UKIP Makassar. Maka perbuatan terdakwa tersebut dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap ketertiban umum. Sehingga dengan demikian unsur dimuka umum telah terpenuhi.

### 4. Unsur bersama-sama

Yang dimaksud dengan bersama-sama dalam unsur ini adalah dua atau lebih orang bekerjasama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik.

Unsur bersama-sama dapat dilihat dari perbuatan terdakwa dengan mahasiswa pengunjung rasa lainnya dan dengan tenaga

bersama dengan cara melakukan kekerasan terhadap barang berupa melakukan perbuatan menendang daun pintu bagian samping ruang rektorat, sehingga pintu bagian samping ruang rektorat rusak dan jebol, selanjutnya pelaku aksi demonstran termasuk para terdakwa masuk dalam ruang rektor, selanjutnya terdakwa I Aprianus duduk dikursi rektor dan menyatakan: enak jadi rektor, dan selanjutnya pada hari minggu tanggal 10 Juni 2012 sore hari, saksi Yosefine melihat terdakwa I Aprianus mengambil potongan kayu meja tersebut kemudian dengan kayu tersebut terdakwa merusak tanaman baik dalam pot maupun yang tertanam. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 sekitar jam 10.00 wita, saat saksi Allin baru tiba di kampus UKIP, dari jarak 5 meter, saksi Allin melihat terdakwa II Gidion melakukan pengrusakan dengan cara memecah kaca-kaca yang sudah pecah dengan menggunakan potongan besi. Dengan demikian unsur secara bersama-sama telah terpenuhi.

#### 5. Unsur ditujukan kepada barang yang mengakibatkan rusak

Dalam unsur ini, kekerasan yang dilakukan tersebut harus ditujukan kepada barang baik itu kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain, dalam unsur ini disyaratkan bahwa kekerasan dilakukan untuk mengganggu ketertiban umum.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat disimpulkan bahwa benar perbuatan kekerasan yang dilakukan para terdakwa terhadap barang-barang milik UKIP Makassar, berupa

daun pintu dan kaca serta mencabut dengan tangan dan memukul dengan potongan kayu dan besi, adalah perbuatan kekerasan yang ditujukan terhadap barang yang mengakibatkan barang menjadi rusak dan tidak dapat dipakai lagi, berupa sehelai daun pintu samping ruang rektorat, kaca jendela dan tanaman bunga berikut potnya, dan dengan perbuatan kekerasan tersebut telah menimbulkan keresahan ditengah-tengah kehidupan kampus UKIP Makassar. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

#### 6. Unsur perbuatan berlanjut

Unsur perbuatan berlanjut dapat dilihat dari perbuatan para terdakwa bersama dengan sejumlah mahasiswa lainnya yang melakukan pengrusakan dimulai pada haru Rabu tanggal 06 Juni 2012, dan dilanjutkan pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012, serta pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 selama beberapa hari berasal dari suatu pelaksanaan keputusan yang terlarang menurut undang-undang, oleh karenanya itu perbuatan para terdakwa tersebut telah melahirkan beberapa tindak pidana yang sejenis yaitu tindak pidana dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang, dan antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain tidak dipisahkan suatu jangka yang relatif cukup lama. Dengan demikian unsur perbuatan berlanjut telah terpenuhi.

Berdasarkan pembuktian unsur-unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP di atas, kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta

hukum yang terungkap dipersidangan, maka disimpulkan bahwa dakwaan JPU sudah terbukti seluruhnya.

Setelah semua unsur-unsur tindak pidana berhasil dibuktikan, maka selanjutnya Majelis Hakim harus mempertimbangkan alasan-alasan pengecualian, pengurangan atau penambahan pidana. Alasan-alasan pengecualian pidana secara umum dibagi atas:

1. Alasan pembenar

- Daya paksa relatif (*relative overmacht*);
- Pembelaan darurat (*noodweer*);
- Menjalankan ketentuan undang-undang; dan
- Melaksanakan perintah jabatan dari pejabat yang berwenang.

2. Alasan pemaaf

- Tidak mampu bertanggung jawab;
- Daya paksa mutlak (*absolute overmacht*);
- Pembelaan yang melampaui batas; dan
- Melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah.

Berdasarkan pada proses pemeriksaan perkara dipersidangan, majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta sebagai alasan pembenar-ataupun alasan pemaaf yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan para terdakwa tersebut, maka atas diri dan perbuatan para terdakwa tersebut harus mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya.

Mengenai alasan pengurangan pidana, Pasal 22 ayat (4) KUHP menyatakan “masa penangkapan atau penahanan dikurangkan dari seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Maka dari rumusan Pasal 22 ayat (4) KUHP ini, sangat beralasan bagi para terdakwa untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Oleh karena dalam perkara ini para terdakwa telah ditahan dan demi adanya kepastian hukum tentang status penahanan terdakwa tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya pidana yang dijatuhkan, dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalankan tersebut.

## **2. Pertimbangan Sosiologis**

Pertimbangan sosiologis adalah pertimbangan hakim yang menggunakan pendekatan-pendekatan terhadap latar belakang, kondisi sosial ekonomi dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dalam menjatuhkan putusannya. Pasal 5 ayat (1) Rancangan KUHP Nasional Tahun 1999-2000, menentukan bahwa dalam pemidanaan, hakim mempertimbangkan:

1. Kesalahan terdakwa;
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
3. Cara melakukan tindak pidana;
4. Sikap batin membuat tindak pidana;
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku;
6. Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana;
7. Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku;
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, terhadap korban atau keluarga.

Kemudian didalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga disebutkan bahwa hakim

dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya, dalam memutus suatu perkara hakim tidak boleh hanya mempertimbangkan aspek yuridisnya saja, tetapi hakim juga harus mempertimbangkan aspek sosiologisnya.

Sebelum menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa seperti yang tertera dalam surat putusan yaitu sebagai berikut:

- a. Hal-hal yang memberatkan
  - Perbuatan para terdakwa telah menimbulkan kerugian materil dan moril terhadap UKIP Makassar.
- b. Hal-hal yang meringankan
  - Para terdakwa belum pernah dihukum
  - Para terdakwa pada dasarnya adalah pribadi yang baik dan para terdakwa telah dijatuhi sanksi pemecatan sebagai mahasiswa oleh UKIP Makassar.

Dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, dihubungkan dengan sifat perbuatan para terdakwa, keadaan-keadaan ketika dilakukan dan memperhatikan sistem pemidanaan di Indonesia, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap para terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan para terdakwa.

Hakim setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas kemudian menjatuhkan sanksi pidana kepada para terdakwa masing-masing terdakwa I Aprianus Alias Karca dengan pidana penjara selama (empat) bulan dan 22 (dua puluh dua) hari, dan terdakwa II Gidion Grace

Pangendongan Alias Gidion, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 17 (tujuh belas) hari.

### **3. Analisis Penulis**

Putusan hakim merupakan pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan untuk itu, berupa putusan penjatuhan pidana jika perbuatan pelaku tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, tentunya hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang terdiri pertimbangan yuridis, meliputi surat dakwaan JPU, Tuntutan Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti dan pertimbangan sosiologis meliputi latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa serta kondisi terdakwa pada saat melakukan perbuatan.

Setelah menguraikan dan selanjutnya menganalisa pertimbangan-pertimbangan hakim dalam perkara ini, menurut Penulis pertimbangan ataupun penilaian-penilaian hakim dalam perkara ini sudah obyektif, telah berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan. Dan hakim pun telah melaksanakan amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim telah mempertimbangkan keadaan-keadaan terdakwa, seperti yang tertera dalam surat putusan bahwa hakim telah mempertimbangkan pribadi para

terdakwa dan terdakwa juga telah dipecat dari kampusnya. Dan beberapa hal yang juga meringankan terdakwa yang tidak tertulis dalam surat putusan dan diperoleh dari hasil wawancara adalah bahwa hakim beranggapan terdakwa masih sangat berpotensi menjadi generasi penerus bangsa. Itu artinya bahwa hakim betul-betul memiliki kepekaan terhadap nilai-nilai keadilan itu. Dimana hakim masih memikirkan masa depan si terdakwa. Dan inilah salah satu tujuan pemidanaan, yang tidak harus semata-mata bersifat pembalasan (teori absolut) tetapi harus memikirkan masa depan terpidana (teori relatif). Disini, yang harus diketahui adalah bahwa penjatuhan sanksi pidana bukanlah semata-mata sebagai upaya pembalasan (teori absolut) dari akibat perbuatan pidana yang dilakukan oleh terpidana, namun ada upaya pembinaan yang ditujukan dan memikirkan kepada hari-hari yang akan datang pada si terpidana, yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat agar menjadi baik kembali.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam Putusan Nomor 1309/Pid.B/2012/PN.Mks yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tenaga bersama di muka umum melakukan kekerasan terhadap barang yang mengakibatkan rusak yang diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sudah tepat, hal itu sesuai dan telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa.
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara dengan Putusan Nomor 1309/Pid.B/2012/PN. Mks ini, pertimbangannya sudah obyektif, telah berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan. Dan hakim pun telah melaksanakan amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

## **B. Saran**

1. Bagi para hakim sebelum memutus suatu perkara, hendaknya selalu melaksanakan amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Karena hakim bukan saja penegak hukum, tetapi juga penegak keadilan.
2. Bagi hakim sebelum menjatuhkan suatu sanksi pidana, harus selalu memperhatikan apa sebenarnya tujuan pembedaan itu, yang tidak hanya mutlak sebagai pembalasan (teori absolut) dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa, tetapi juga memperhatikan masa-masa yang akan datang terdakwa (teori relatif).

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo: Jakarta.
- Amir Ilyas, Yuyun Widaningsih. 2010. *Hukum Korporasi Rumah Sakit*. Rangkang Education: Yogyakarta.
- Amir Ilyas, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education: Yogyakarta.
- Andi Zainal Abidin Farid. 2007. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Andi Hamzah. 2004. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.
- , 2011. *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Antonius Sudirman. 2009. *Eksistensi Hukum & Hukum Pidana dalam Dinamika Sosial - Suatu Kajian Teori dan Praktek di Indonesia*. BP Undip: Semarang.
- A. Rasyid Rahman. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan*. UPT MKU Universitas Hasanuddin Makassar: Jakarta.
- Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*. PT Rafika Aditama: Bandung.
- Ilhami Basri. 2003. *Hukum Pidana dan Regulasi Implementasi Indonesia*. Alqaprint: Bandung.
- Depertemen Pendidikan Dan Kebudayaan. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Penerbit Balai Pustaka: Jakarta.
- Leden Marpaung. 2005. *Asas - Teori - Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT Rineka Cipta: Jakarta.
- M. Taufik Makarao. 2005. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Kreasi Wacana: Yogyakarta.

Ninieek Suparni. 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Sinar Grafika: Jakarta.

P.A.F. Lamintang. 2009. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Abadi: Bandung.

Putusan Nomor 1309/Pid.B/2012/PN.Mks.

R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*. Politea: Bogor.

R. Sugandhi. 1980. *K.U.H.P Dengan Penjelasannya*. Usaha Nasional: Surabaya.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.